

**PENGARUH ANGGARAN PEMBANGUNAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN
LUWU TIMUR PERIODE 2014-2018**

SKRIPSI

Oleh
SUDI SURAHMAN
105710200514



**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

SKRIPSI

**PENGARUH ANGGARAN PEMBANGUNAN TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI KABUPATEN LUWU TIMUR 2014-2018**

**SUDI SURAHMAN
NIM 105710200514**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S1) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar**



**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2019**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)” (QS 94: 6-7)

*“bunga yang tidak akan layu sepanjang zaman adalah kebajikan”
(william cowper)*

“Sedikit pengetahuan yang diterapkan jauh lebih berharga ketimbang banyak pengetahuan yang tak dimanfaatkan” (Kahlil Gibran)



*Sebuah persembahan untuk semua keluargaku
tercinta dan orang-orang yang selalu mensupport*



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No.259 gedung iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul penelitian : “Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur
Periode 2014-2018”

Nama mahasiswa : SUDI SURAHMAN
No. Stambuk/NIM : 105710200514
Jurusan : Ilmu Ekonomi Pembangunan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Telah diujikan dan diseminarkan pada hari sabtu tanggal 04 mei 2019

Makassar 15 mei 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Hj. Arniati, SE, M. PD
NIDN : 0907037104

Asdar, SE., M. Si
NIDN : 0903039102

Mengetahui,

Ketua jurusan IESP,

Hj. Naidah, SE., M. Si
NBM : 710 561

ABSTRAK

Sudi Surahman, 2019, Skripsi ini berjudul : Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, Pembimbing 1. Dr. Hj. Arniati, SE, M. PD, Pembimbing 2. Asdar, SE., M. Si

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pengaruh pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, dengan jenis data *time series* tahunan periode 2014-2018 yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik). Variabel yang digunakan adalah PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Model analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana dengan menggunakan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci : Anggaran Pembangunan, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

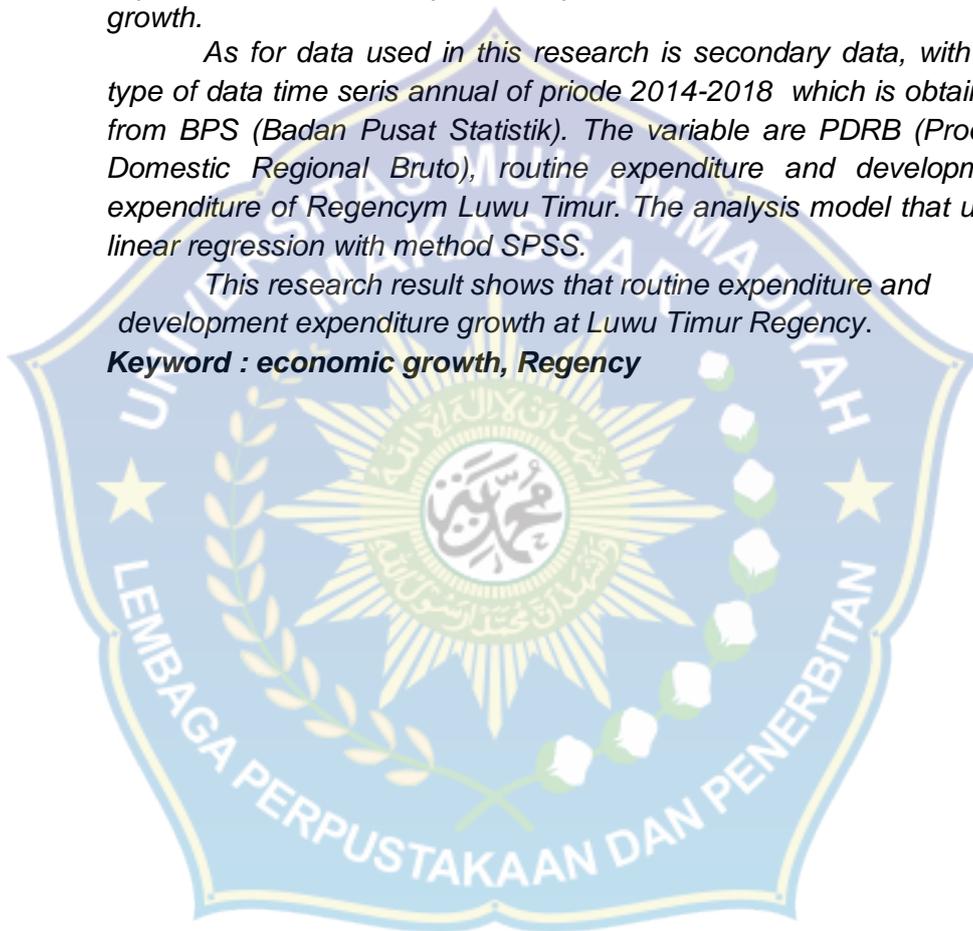
Sudi Surahman, 2019 *The Skripsi titled : The influence towards economy growth at Luwu Timur Regency*. Dr. Hj. Arniati, SE, M. PD, Asdar, SE., M. Si.

The economic growth means improvement activity which causes goods and service which produced to increase and society welfare increases. In this research explains to how routine expenditure and development expenditure influence the economic growth.

As for data used in this research is secondary data, with the type of data time seris annual of priode 2014-2018 which is obtaining from BPS (Badan Pusat Statistik). The variable are PDRB (Product Domestic Regional Bruto), routine expenditure and development expenditure of Regencym Luwu Timur. The analysis model that used linear regression with method SPSS.

This research result shows that routine expenditure and development expenditure growth at Luwu Timur Regency.

Keyword : economic growth, Regency



KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tidak henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur Periode 2014-2018”**.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan terimah kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Muh. Kabir dan Ibu Nurhaedah yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam memenuhi ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Hj. Naidah, SE.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Asdar, SE, M.S.i selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Hj. Arniati SE, M.PD selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi selesai dengan baik.
6. Bapak Asdar, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
7. Bapak/Ibu Dosen dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
8. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Univeritas Muhammadiyah Makassar.
9. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program studi IESP angkatan 2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
10. Rekan-rekan saya di kelas IESP 1-14 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongannya selama ini.

11. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi Fil Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 1 Juli 2018

PENULIS

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR/BAGIAN	xiii
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	8
1. Pengertian Anggaran	8
2. Pengertian Pembangunan	13
3. Konsep Anggaran Pembangunan	14
4. Konsep Pembangunan Ekonomi	17
5. Konsep Pertumbuhan Ekonomi	19
6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah	20
7. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi	20
8. Hubungan Anggaran Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi	29
B. Tinjauan Empiris	32
C. Kerangka Konsep	35
D. Hipotesis	36
III METODE PENELITIAN	
A. Jenis penelitian	37

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Defenisi Operasional Variabel.....	38
D. Populasi dan Sampel.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Analisis	41
G. Rancangan Pengujian Hipotesis	42
IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Timur	44
B. Struktur Organisasi	52
V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Perekonomian Kabupaten Luwu Timur.....	54
B. Realisasi Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur.....	56
C. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur	57
D. Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	59
E. Pembahasan Hasil Penelitian	62
VI SIMPULAN DAN SARAN	
A. Simpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur tahun 2010-2018.....	4
Tabel 1.2	APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018....	5
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Kecamatan Tahun 2017	48
tabel 4.2	Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2017.....	49
Tabel 5.1	PAD Luwu Timur 2014-2018	54
Tabel 5.2	Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Timur Periode 2014-2018.....	55
Tabel 5.3	Pendapatan Sah Lainnya pada Kabupaten Luwu Timur Periode 2014-2018	55
Tabel 5.4	Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur 2009-2018	56
Tabel 5.5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur 2009-2018	58
Tabel 5.6	Analisis Koefisien Determinasi	60
Tabel 5.7	Uji Statistic T	61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur	36
Gambar 4.1.	Komposisi Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2017	47
gambar 4.2	struktur organisasi kabupaten luwu timur.....	52
Gambar 5.1	Grafik Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Periode 2009-2018	57
Gambar 5.2	Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Periode 2009-2018	59



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melihat pembangunan perekonomian sektor ekonomi kabupaten Luwu Timur, upaya penuntasan kemiskinan dan pemerataan pun mulai dikedepankan sebagai fokus utama pembangunan dan menjadi momentum yang berharga bagi pemerintah dan masyarakat untuk melancarkan pembangunan di segala lini kehidupan masyarakat. Hak otonomi luas yang diperoleh pemerintah dan masyarakat di wilayah itu untuk menyikapi berbagai persoalan dan pembangunan yang dihadapi.

Walaupun demikian, pada sisi lain berbagai kebijakan program pembangunan yang menjadi agenda pemerintah daerah beberapa diantaranya masih memerlukan beberapa penajaman akselerasi, Pada Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur No 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 , penyusunan kebijakan dan program yang akan dijabarkan dalam RKPD tahun 2015, akan lebih di aktualkan dan di fokuskan pada agenda yang di maksud. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan selama lima (5) tahun terakhir diperoleh kesimpulan bahwa dari program prioritas pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2014-2018, Beberapa diantaranya masih memerlukan upaya serius dan intens agar dalam pelaksanaanya dapat lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Program tersebut meliputi, kebijakan pembangunan instruktur dasar, penurunan jumlah penduduk miskin, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pembangunan pedesaan.

Program tersebut memerlukan perhatian serius dalam tahun 2013 serta perkuatan program dan kegiatan tahun 2015 ini, agar tuntutan RKPD tahun 2015 Kabupaten Luwu Timur dan pelaksanaan RPJMD yang akan berakhir dalam tahun 2015 dapat dituntaskan.

1. *Pertama*, kemampuan SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang masih Terbatas, Terutama dalam memahami dan mengimplementasikan berbagai aturan perundang-undangan yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan bagian dari masing-masing agenda.
2. *Kedua*, rendahnya tingkat pendidikan sebagian besar masyarakat mengakibatkan mereka tidak dapat terserap masuk kedalam sektor-sektor yang ada sebagai tenaga kerja, karena skill dan kompetensi yang rendah, serta kurang dapat bersaing dengan para pencari kerja lainnya yang lebih memiliki kapasitas.
3. *Ketiga*, kelembagaan pemerintah dan masyarakat desa yang belum berkembang dan relative masih lemah sehingga kurang dapat mengikuti akselerasi penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan masyarakat yang dijalankan oleh pemerintah daerah.

Memperhatikan kondisi riil sebagaimana dikemukakan di atas maka dalam penyusunan RKPD kabupaten Luwu Timur tahun 2016, Prioritas pembangunan daerah akan lebih di fokuskan pada :

1. Penguatan pemenuhan kualitas mutu pelayanan dasar murah.
2. Peningkatan produksi dan hasil olahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

3. Peningkatan fasilitas Investasi industri dan daya saing daerah.
4. Pembangunan infrastruktur pendukung berwawasan lingkungan.
5. Penguatan Industri Kecil dan Menengah (IKM).
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari hasil perealisasi program-program pembangunan pembangunan selama era implementasi otonomi daerah mengenai pendapatan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD tahun 2014, menggeser paradigma pemerintah dalam pembangunan SDM dan juga memprakarsai dan mengevaluasi pemerintah maupun pembangunan.

Dasar dari penelitian-penelitian terdahulu untuk melihat suatu daerah berkembang dari segi pembangunan perekonomian tak lepas dari anggaran pembangunan suatu daerah. Erat kaitannya dengan anggaran pembangunan dan upaya mamacu pertumbuhan ekonomi.

Dapat dideskripsikan bahwa untuk melihat perkembangan daerah yang berkelanjutan dari sektor ekonomi pemerintah perlu membentuk badan-badan untuk pembangunan dan perkembangan daerah, menjalin hubungan kerjasama antar daerah (regional linkage), pembentukan proyek yang lebih produktif, jika kegiatan-kegiatan yang mendorong besaran jumlah pengeluaran pemerintah.

Melalui penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan harus dioptimalkan selama lima tahun, sebab disatu sisi naik-turunnya jumlah penduduk miskin dari tahun 2014-2018 menandai bahwa kurang optimalnya pemerintah mengelola sumber pendapatan daerah walaupun telah memiliki perkembangan.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018

No	Tahun	Angka Kemiskinan
1	2014	20,780 (7,67)
2	2015	19.670 (7,18)
3	2016	21,080 (7,52)
4	2017	21,900 (7,7)
5	2018	21,015 (7,23)

Sumber : BPS Kabupaten Luwu Timur 2018

Berdasarkan tabel di atas pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah melakukan perkembangan menuntaskan kemiskinan namun butuh pengoptimalan; dilihat dari tahun 2014 penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur sebesar 20,780 jiwa atau 7,67 persen, sedangkan pada tahun 2015 penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 19,670 jiwa, hal ini berarti selama kurun waktu 2014-2015 penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan yang tidak signifikan yaitu 0,49 persen atau 1.110 jiwa dari total penduduk 275.523 jiwa, namun pada tahun 2016-2017 mengalami kenaikan dari 7,52 persen naik 7,7 persen atau 21,900 jiwa tetapi pada tahun 2018 mengalami penurunan yaitu 21015 jiwa atau 7,23 persen.

Anggaran keuangan daerah merupakan hal yang sangat substansi dan menjadi penentu bagi berkelanjutannya pembangunan daerah. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dana daerah yang harus lebih ditingkatkan untuk menjamin pembangunan di sektor perekonomian.

Namun untuk bergerak dalam bidang pembangunan di sektor ekonomi, tidak bisa terlepas dari besarnya Anggaran Pembangunan Daerah (APD) yang digunakan oleh pemerintah daerah, bagaimana dapat di lihat dalam tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2
APBD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014-2018

NO	TAHUN	APD	PAD	ABD
1	2014	421.662.901	19.255.492	478.360.086
2	2015	513.649.266	21.901.552	596.607.459
3	2016	942.475.051	53.921.492	672.757.349
4	2017	616.672.781	46.490.002	783.788.339
5	2018	690.086.958	50.941.901	800.855.947

Sumber : DPPKAD Kabupaten Luwu Timur 2019

Besarnya pengaruh Anggaran Pendapatan Daerah (APD) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten luwu timur dapat dilihat dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Belanja Daerah (ABD), dimana pada tahun 2015 APD 513.649.266, PAD 21.901.552 dan ABD 596.607.459 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 dimana APD 421.662.901, PAD 19.255.492, dan ABD 478.360.086, dan ditahun 2016 APD mengalami kenaikan secara signifikan yaitu 942.475.051, menghasilkan PAD 53.921.492, dengan ABD yang dikeluarkan yaitu 672.757.349 dan namun ditahun 2017 APD mengalami penurunan sebesar 616.672.781 dan ABD yang dikeluarkan yaitu 783.788.339 menghasilkan PAD sebesar 46.490.002, namun ditahun 2018 APD mengalami kenaikan

sebesar 690.086.958, begitu juga PAD 50.941.901 dan ABD sebesar 800.855.947.

Hubungan yang mendasar dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi ditinjau dari APBD bahwa proses penyaluran kebijakan alokasi anggaran pembangunan adalah kebutuhan dan permasalahan daerah terutama dalam bidang pendidikan perekonomian dan sumber daya aparatur, potensi sosial dan potensi perekonomian masyarakat, strategi dan arah kebijakan pembangunan program strategi pada masing-masing unit kerja di Kabupaten Luwu Timur.

Besarnya anggaran pembangunan dan belanja daerah di Kabupaten Luwu Timur tentu saja sangat berkaitan pada pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji ***“Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur Periode 2014-2018”***

B. Perumusan Masalah

Setelah mengkaji dari uraian latar belakang dapat ditarik suatu kesimpulan rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah anggaran pembangunan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur periode 2014-2018?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur periode 2014-2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khususnya tentang pengaruh anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun pembaca dalam mengelola anggaran yang digunakan untuk mewujudkan terlaksananya kegiatan pembangunan.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian Anggaran

Anggaran adalah suatu proses penyusunan rencana keuangan yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan kemasing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Masing-masing kegiatan tersebut dikelompokkan dalam program berdasarkan tugas dan tanggung jawab dari satuan kerja tertentu (dinas pendidikan: penyusunan kurikulum, pemeliharaan gedung dan penyusunan tenaga pengajar)

Kebijakan anggaran atau disebut juga kebijakan fiscal menjelaskan tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam hal ini kebijakan anggaran untuk mengendalikan dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan fiscal.

a. Kebijakan Anggaran

Salah satu kebijakan yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah dan pembangunan adalah system pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian yang optimal akan tetapi, rasa keadilan anggaran belum memperlihatkan daya keseimbangan sehat antara anggaran pemerintah pusat disuatu pihak pemerintah daerah dilain pihak sehingga menimbulkan kesenjangan secara vertikal yang sangat

berpengaruh terhadap kinerja pembangunan searah keseluruhan. Kebijakan anggaran atau disebut juga dengan kebijakan fiskal dimana kebijakan tersebut menjelaskan tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan anggaran untuk mengendalikan dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal. (sukirno 2011)

b. Anggaran Pembangunan

Anggaran pembangunan adalah belanja modal yaitu kegiatan yang bersifat non recurring capital expenditure yang penyelesaiannya dalam periode tertentu biasanya sampai 6 tahun. Proyek pembangunan umum searah akan terdiri dari pekerjaan yang akan dilaksanakan pada periode tertentu sedangkan biaya investasi belum kembali dalam waktu tertentu, biasanya sampai 5 tahun dengan 6 tahun.

c. Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari beberapa pendapatan daerah yaitu :

1. Pajak daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar dibandingkan dengan pendapatan asli yang berasal dari retribusi. Bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya, Biaya administrasi pemungutan akan diterima oleh daerah. Peningkatan ditempuh melalui :

- a. Peningkatan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis-jenis tersebut.
 - b. Peranan appraisal/alutution terhadap aset-aset daerah.
 - c. Meningkatkan efisiensi dengan cara pengelolaan dan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif.
2. Transfer fiscal daerah provinsi kedaerahan kabupaten kota.

Sesuai dengan ketentuan UU no. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan dari UU No. 10 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah telah diatur antara lain mengenai bagi hasil pajak dan realokasi pajak provinsi dengan kabupaten kota.

a. Bagi hasil pajak provinsi

Penerimaan pajak provinsi yang bersumber dari PKB-KAA, BBNKB-KAA, B3BT dan AP sebagian diserahkan kepada daerah/Kota.

- 1) Minimum 30% dari penerimaan PKB KAA dan BBNKB-KAA
- 2) Minimum 70% dari penerimaan PBBKB
- 3) Minimum 70% dari penerimaan P3ABT dan AP

Pengalihan bagian penerimaan pajak daerah provinsi atas lebih lanjut akan diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah provinsi antar daerah kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

b. Transfer Pajak Kabupaten

Menurut ketentuan dalam UU no. 34 tahun 2000 minimum 10% dari hasil penerimaan pajak kabupaten/ kota dialokasikan untuk kepentingan desa. Pengaturan mengenai alokasi tersebut

didasarkan pada aspek pemerataan dan potensi yang dimiliki oleh desa-desa yang bersangkutan.

3. Retribusi Pajak

Retribusi Pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Yang termasuk golongan retribusi pajak adalah :

- a. Retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, perizinan tertentu ditetapkan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang.
 - b. Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan dalam peraturan pemerintah sesuai dengan kewenangan otonominya dengan memenuhi kriteria ditetapkan.
 - c. Hasil penerimaan jasa retribusi tertentu daerah kabupaten//kota sebagian diperuntukkan kepada desa dan penetapan dengan perda/ kabupaten dengan memperhatikan keterlibatan desa dalam penyediaan layanan tersebut.
- ### 4. Penerimaan Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah Lainnya.

Selain pajak daerah retribusi daerah, sebagian laba perusahaan milik daerah BUMD merupakan salah satu sumber yang mencakup potensi untuk dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMD seperti kelemahan manajemen, masalah kepegawaian dan terlalu banyak campur tangan pejabat daerah, sehingga tidak berjalan efisien.

Menurut teori ada 3 (tiga) kiat dalam memilih bidang usaha yang dapat membantu mengembangkan perusahaan daerah.

- a. Harus ada pemisah antara pembuat kebijaksanaan (eksekutif) dengan bagian keuangan agar menghasilkan pelayanan yang efisien.
 - b. Produk yang dihasilkan harus laku dijual, berkualitas baik dan bermanfaat bagi private good.
 - c. Cara menetapkan harga harus berdasarkan hubungan antara biaya produk dengan harga jual kepada konsumen perorangan.
5. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah diidentikkan dengan pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas ke pemerintahannya yang setiap tahun. Pengeluaran pemerintah yang didasarkan pada tahap-tahap pertumbuhan ekonomi menyatakan pada pengeluaran pemerintah semakin meningkat berdasarkan kegiatannya dalam menjalankan tugas ke pemerintahannya dalam rangka pelayanan publik untuk tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akses pertumbuhan ekonomi atau PDRB dan diyakini antara PAD dan Pertumbuhan ekonomi terdapat korelasi. Oleh karena itu dalam keadaan normal meningkatnya GNP merupakan penerimaan pemerintah yang semakin besar dan pengeluaran pemerintah besar pula.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dapat disimpulkan bahwa pendapatan nasional memegang peranan penting dalam menentukan perbelanjaan pemerintah. Anggaran

pemerintah dalam hal ini adalah untuk mengarahkan tujuan pembangunan ekonomi berjenjang dalam jangka panjang.

2. Pengertian Pembangunan

Di Indonesia istilah pembangunan seringkali berkonotasi atau berarti dalam membangun infrastruktur atau fasilitas fisik. Pada dasarnya, pengertian pembangunan secara umum adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju kekeadaan yang lebih baik yang berdasarkan norma-norma tertentu. Dalam pengertian pembangunan, para ahli kemudian memberikan definisi yang juga bermacam-macam sama halnya dengan perencanaan.

Istilah pembangunan dapat juga didefinisikan atau diberikan pengertian yang berbeda-beda oleh satu orang dengan orang lain, negara satu dengan negara lainnya. Namun secara umum terdapat kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah dalam menghasilkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan hidup manusia.

Definisi dari pembangunan adalah perkataan yang digunakan secara luas dalam seluruh media massa di seluruh dunia dan merupakan konsep yang biasa diperbincangkan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari timur dan juga barat. Walaupun sangat sering diucapkan dan didengar namun pengertian pembangunan begitu luas cakupannya.

Pengertian pembangunan juga butuh dihayati sebelum seseorang dapat memahami keseluruhan proses dan juga teori dari pembangunan.

Usaha tersebut konsep pembangun jauh lebih suka dari pada memahami proses dan teori dari pembangunan. Namun terdapat beberapa pengertian pembangunan atau definisi pembangunan yang dapat dikatakan bahwa pengertian pembangunan adalah konsep pertumbuhan ekonomi, modernisasi, industrialisasi, normatif atau hak keperluan asas, dan environmentalisme.

3. Konsep Anggaran Pembangunan

a. Anggaran Pembangunan

Salah satu kebijakan yang penting dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah adalah sistem pengelolaan keuangan sebagai realisasi dari kebijakan anggaran yang menjamin adanya semangat efisiensi dan efektifitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian yang optimal. Akan tetapi, rasa keadilan anggaran belum memperlihatkan daya keseimbangan sehat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dilain pihak, sehingga menimbulkan kesenjangan secara vertikal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja pembangunan secara keseluruhan (Nafarin, 2012).

Kebijakan anggaran atau disebut juga dengan kebijakan fiskal, dimana kebijakan tersebut menjelaskan tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Dalam hal ini kebijakan anggaran untuk mengendalikan dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal. Kebijakan anggaran atau disebut juga kebijakan fiskal menjelaskan tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah dalam hal kebijakan anggaran untuk mengendalikan dan

mencatat hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Anggaran pembangunan adalah belanja modal yaitu kegiatan yang bersifat non recurring capital expenditure yang penyelesaiannya dalam periode tertentu, biasanya mencapai 6 tahun. Proyek pembangunan daerah akan terdiri dari pekerjaan yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, sedangkan biaya investasinya belum kembali dalam waktu tertentu, biasanya sampai 5 tahun atau dengan 6 tahun.

Perencanaan yang demokratis sebagai dasar penyusunan pembangunan modal investasi itu terutama perencanaan umum jangka panjang (program kerja jangka panjang) dan perencanaan fiskal. Rencana strategi adalah suatu statement mengenai tujuan pembangunan daerah dalam arti fisik. Hal ini merupakan dokumen yang memberikan gambaran dan analisis tentang faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi perubahan dalam masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah. Rencana kerja strategi itu menjadi dasar kebutuhan penyediaan fasilitas publik yang sesuai dengan standar Nasional yang digunakan untuk daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, Dinas-dinas akan sangat berperan dalam pelaksanaan program dan proyek berjangka menengah dan jangka panjang (lima tahun ke atas). Untuk pembiayaan program pembangunan jangka panjang ini, penting pula dipertimbangkan kebijakan fiskal, kemudian pola penerimaan dan pengeluaran daerah yang akan datang.

b. Anggaran Pembangunan Daerah

1. Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah penerimaan daerah atau pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari beberapa pendapatan daerah yaitu :

a. Pajak Daerah

Salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak merupakan sumber pendapatan yang besar dibandingkan dengan jenis pendapatan asli yang berasal dari retribusi. Bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Biaya administrasi pemungutan akan diterima oleh daerah.

b. Transfer fiskal daerah Provinsi ke daerah Kabupaten/Kota

Sesuai dengan ketentuan UU no. 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan dari UU no. 10 tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah telah diatur antara lain mengenai bagi hasil pajak dan relokasi pajak Provinsi dengan Kabupaten/Kota.

c. Retribusi Pajak

Retribusi pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada pemakai jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.

d. Penerimaan hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil Pengelolaan Daerah lainnya.

Selain pajak retribusi daerah, sebagian laba perusahaan milik daerah BUMD merupakan salah satu sumber yang mencakup potensi untuk dikembangkan. Beberapa kendala yang dihadapi oleh BUMD seperti kelemahan manajemen, masalah

kepegawaian, dan terlalu banyak campur tangan pejabat daerah berjalan tidak efisien.

2. Anggaran Belanja Daerah

Anggaran belanja daerah diidentikkan dengan pengeluaran pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahannya yang setiap tahun. Pengeluaran pemerintah yang didasarkan pada tahap-tahap pertumbuhan ekonomi masyarakat bahwa pengeluaran pemerintah semakin meningkat berdasarkan kegiatannya dalam menjalankan tugas pemerintahannya dalam rangka pelayanan publik untuk tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akses pertumbuhan ekonomi atau PDRB dan diyakini antara PAD dan pertumbuhan ekonomi terdapat korelasi. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP merupakan penerimaan pemerintah yang semakin besar dan pengeluaran pemerintah besar pula.

4. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi bukanlah suatu konsep yang baru. Selama tahun dimasa ahli-ahli ilmu sosial terlibat dengan pembangunan ekonomi, tetapi mereka tidak mengembangkan suatu teori sistematis mengenai pertumbuhan ekonomi. Pembangunan merupakan usaha penciptaan kombinasi-kombinasi baru berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam keadaan stabil, kombinasi baru itu terjadi dalam bentuk inovasi.

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjuk oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, namun lebih dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi, justru mendapat tempat strategis dalam proses pembangunan. Begitu kompleksnya pembangunan menyebabkan tidak ada teori yang tepat diterapkan bagi semua Negara di dunia hingga saat ini. Mendominasi perkembangan teori pembangunan dalam bukunya (**Kuncoro, 2006**) sejak pertama kali yang dikemukakan oleh Adam Smith dan mengalami puncak kejayaannya dengan lahirnya teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh Rostow.

a. Teori pembangunan Karl Marx (1867)

Menurut teori Karl Marx, dalam bukunya yang berjudul *Das Kapital* membagi evolusi perkembangan masyarakat menjadi tiga, yaitu dimulai dari feodalisme, kapitalisme dan kemudian yang terakhir adalah Sosialisme. Evolusi perkembangan masyarakat ini akan sejalan dengan proses pembangunan yang dilakukannya. Seperti halnya pada masa feodalisme, pada masa kapitalisme ini para pengusaha merupakan pihak yang memiliki tingkat posisi tawar menawar tertinggi relative terhadap pihak lain khususnya kaum buruh. Marx menyesuaikan asumsinya terhadap cara pandang ekonomi klasik ketika itu dengan memandang buruh sebagai salah satu input dalam proses produksi. Artinya buruh tidak memiliki posisi tawar menawar sama sekali terhadap para majikannya, yang merupakan kaum kapitalis. Konsekuensi logis penggunaan asumsi dasar tersebut adalah

kemungkinan terjadinya eksploitasi besar-besaran yang dilakukan para pengusaha terhadap buruh.

Nilai lebih merupakan keuntungan yang di peroleh oleh pengusaha. Karena tingkat keuntungan yang diperoleh para pengusaha adalah fungsi dari nilai lebih. Nilai lebih akan meningkat jika upah diturunkan atau produktifitas dinaikkan dengan asumsi semua faktor tidak berubah.

b. Teori pembangunan Arthur Lewis (1954)

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada.

5. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi adalah perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu Negara seperti pertambahan dan jumlah barang produksi perkembangan infrastuktur, dan pertambahan jumlah modal produksi.

Apabila dalam system sosial dan sikap masyarakat yang menghambat laju pertumbuhan ekonomi pemerintah haruslah berusaha menghapus hambatan-hambatan tersebut.

6. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Perkembangan teori ekonomi pertumbuhan dan meningkatnya ketersediaan data daerah mendorong meningkatnya perhatian terhadap ketidak merataan pertumbuhan daerah. Teori ekonomi pertumbuhan dimulai oleh Robert Solow yang dikenal dengan model pertumbuhan neo-klasik. Dan beberapa ahli ekonomi Amerika mulai menggunakan data-data daerah. Untuk melihat ketidak merataan pertumbuhan ekonomi regional dapat ditentukan dengan beberapa cara. Secara umum dalam menghitung pertumbuhan dengan:

1. Pertumbuhan output
2. Pertumbuhan output per pekerja
3. Pertumbuhan output perkapita

★ Pertumbuhan output digunakan untuk mengetahui indikator kapasitas produksi. Pertumbuhan output per pekerja seringkali digunakan untuk mengetahui indikator dari perubahan tingkat kompetitifitas daerah, sedangkan pertumbuhan output perkapita digunakan sebagai indikator perubahan dari kesejahteraan.

7. Teori-Teori Pertumbuhan Ekonomi

Istilah pertumbuhan ekonomi bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan yang lainnya, satu daerah dengan daerah lainnya, satu Negara dengan negara lainnya maka penting bagi kita untuk dapat memiliki defenisi yang sama dalam mengartikan pertumbuhan ekonomi, berikut pendapat mengenai pengertian atau defenisi pertumbuhan ekonomi menurut *para ahli* :

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi Adam Smith

Adam Smith membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 (lima) tahapan yang berurutan yaitu mulai masa perburuan, masa beternak, masa bercocok tanam, perdagangan dan yang terakhir adalah tahap perindustrian. Menurut teori ini masyarakat akan bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern yang kapitalis. Dalam prosesnya pertumbuhan ekonomi akan semakin terpacu dengan adanya sistem pembagian kerja ekonomi antara pelaku ekonomi. Dalam hal ini, Adam Smith memandang pekerjaan sebagai salah satu input (masukan) bagi proses produksi. Pembagian kerja merupakan titik sentral pembahasan dalam teori Adam Smith.

Proses pertumbuhan ekonomi akan menjadi simultan dan memiliki hubungan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Tinggi peningkatan kerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi semakin pesat. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu "fungsi tujuan" pada akhirnya harus tunduk terhadap "fungsi kendala" yaitu keterbatasan sumber daya ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan mulai mengalami perlambatan jika daya dukung alam tidak mampu lagi mengimbangi aktivitas ekonomi yang ada. Keterbatasan sumber daya ekonomi merupakan faktor yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi bahkan dalam proses perkembangannya hal tersebut justru akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan terus

terjadi karena mata rantai tabungan, akumulasi modal dan investasi akan tetap terjalin dan berkaitan erat satu sama lain.

Adam Smith mengasumsikan hanya para tuan tanah dan pengusaha yang mampu melakukan aktivitas menabung, untuk kemudian modal tersebut diinvestasikan ke sektor riil. Dalam hal ini implisit Adam Smith bahwa gaji pekerjaan demikian kecilnya, sementara disisi lain laba pengusaha demikian besarnya sehingga mampu mengakumulasi modalnya. Perombakan dalam sistem sosial seperti penghapusan tuan tanah dan memberikan tanah kepada petani yang tidak memiliki tanah. Dalam hal ini dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari tahun ketahun. Dengan mengamati pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun dapalah dinilai dari prestasi dan kesuksesan dari negara tersebut dalam mengendalikan kegiatan ekonominya dalam jangka pendek dan usaha mengembangkan perekonomiannya dalam jangka panjang. (Sukirno 2011)

Pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara simultan dan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya peningkatan kinerja pada satu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialis dan memperluas pasar.

Hal itu akan memacu pertumbuhan ekonomi secara cepat. Disisi lain pada masa pemupukan modal menjadi kata kunci bagi upaya peningkatan pendapatan yang lebih besar dimasa yang akan datang. Sejalan dengan perkembangan teknologi, para pengusaha menguasai

faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya pada input modal yang bersifat pada kapital.

b. Teori Pertumbuhan Rastow

Teori yang dikemukakan Rastow merupakan jeda depan dan *linear stage of growth theory*. Pada dekade 1950-1960 teori Rastow banyak dipengaruhi pandangan persepsi para ahli ekonomi mengenai strategi pembangunan yang harus dilakukan. Teori Rastow didasarkan pada pengalaman pembangunan yang telah dialami oleh negara-negara maju di Eropa.

Dengan mengamati proses pembangunan di Negara-negara maju di Eropa mulai dari abad pertengahan hingga abad modern kemudian Rastow memformulasikan pola pembangunan yang ada menjadi tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara tersebut.

c. Teori Pertumbuhan Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar (1947) ini dikembangkan oleh dua ekonom yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.

3. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
4. Kecenderungan untuk menabung besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output dan rasio pertambahan modal-output.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output. Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh.

d. Teori Pertumbuhan Ekonomi Baru

1. Teori Pertumbuhan Baru (NGT)

Teori pertumbuhan baru, yang pada dasarnya merupakan teori pertumbuhan endogen, memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan endogen karena menganggap pertumbuhan GNP lebih ditentukan oleh sistem proses produksi dan bukan berasal dari luar sistem. Berbeda dengan teori tradisional neoklasik yang menganggap pertumbuhan GNP sebagai akibat dari keseimbangan jangka panjang. Motivasi dasar dari teori NGT adalah

menjelaskan perbedaan tingkat pertumbuhan antarnegara dan proporsi yang lebih besar dari pertumbuhan yang diamati.

2. Teori Geografi Ekonomi Baru (NEG)

Salah satu sumbangan yang paling penting teori neo klasik adalah pengenalan terhadap keuntungan-keuntungan aglomerasi (Preer, 1992:34). Pelopor teori neo klasik mengajukan argumentasi bahwa aglomerasi muncul dari perilaku para pelaku ekonomi dalam mencari penghematan aglomerasi, baik penghematan lokalisasi maupun urbanisasi.

Sebagaimana diidentifikasi oleh Krugman :

- a) Pertama, lokasi kegiatan ekonomi dalam suatu negara merupakan topik yang penting dengan sendirinya
- b) kedua, garis antara ilmu ekonomi internasional dengan ilmu ekonomi regional menjadi semakin kabur
- c) ketiga, alasan yang paling penting untuk melihat kembali geografi ekonomi adalah laboratorium intelektual dan empiris yang disediakannya (Krugman, 1999).

3. Teori Perdagangan Baru (NTT)

Teori keunggulan komparatif mengajukan dalil bahwa :

- (1) negara berdagang untuk memperoleh keuntungan dari perbedaan sumber daya alam yang mereka miliki
- (2) daerah akan berspesialisasi berdasarkan keunggulan komparatif yang mereka miliki.

Disamping itu perkembangan negara maju terutama negara-negara maju di eropa dan Amerika Serikat, berlaku kekacaun sosial, politik dan

ekonomi yang sangat mempengaruhi taraf kemakmuran masyarakatnya. Perang dunia pertama pengambil alihan pemerintah rusia oleh kaum komunis dan dampak the greet depression yang bermula di amerika serikat yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh tidak dapat diwujudkan dan tingkat pengangguran yang dihadapi sangat serius. Keadaan merupakan salah satu faktor yang mendorong pengembangan teorinya yang menoba menerangkan sebab-sebab pengangguran serius dapat berlaku seara berkepanjangan dalam setiap perekonomian. Sejarah perkembangan Amerika menunjukkan bahwa pengangguran yang tingi dialami sejak zaman depresi pada akhir tahun 1920-an baru dapat teratasi pada permulaan perang dunia kedua yaitu 10 tahun sesudah depresi itu bermula. Masa-masa sesudah perang dunia kedua merupakan lembaran baru dalam perekonomian negara maju. Pada akhir tersebut, walaupun inggris dan Amerika Serikat dapat menghanurkan jerman dan jepang tetapi perekonomiannya berjumlah pada tingkat kemakmuran yang diharapkan. Sedangkan Negara-negara yang terjerumus dalam peperangan jepang di Negara-negara Eropa, mengalami kehancuran dari segi fasilitas kegiatan produksi pengangguran menjadi sangat serius dan tingkat kemakmuran merosot.

Akan tetapi dilatar belakangi kehancuran ekonomi tersebut, pertumbuhan ekonomi di Negara-negara maju sesudah akhir perang dunia kedua jauh lebih pesat dari dalam periode sebelum itu, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat sebagai akibat keperluan memproduksi alat perang pada waktu perang dunia kedua dapat terus dipertahankan sesudah perang. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang

tinggi, yang bersumber dari menghasilkan barang untuk konsumen dapat berlangsung secara berkepanjangan dan mampu mengatasi masalah pengangguran.

4. Teori Keynes

Bersama perkembangan ekonomi yang sangat berbeda dimasa perang dunia kedua dengan keadaan ekonomi sebelumnya, segolongan ahli-ahli ekonomi, memperhatikan isu-isu yang menjadi sumber perbedaan pandangan diantara klasik dan keynes. Sebagaimana dijelaskan dalam makro ekonomi (sukirno 2011) dibedakan dalam empat golongan pemikiran yaitu :

a. Golongan Monetaris

mengenai bentuk kebijakan pemerintah apabila diperlukan keyakinan atas friedman bahwa system pasar bebas cukup efisien dalam mengatur kegiatan ekonomi dan mampu menyebabkan perekonomian selalu beroperasi pada kesempatan kerja.

b. Golongan Ekspektasi Rasional

Semua pelaku ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk beluk perekonomian dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kegiatan perekonomian. Sebagai akibat dari keyakinan yang kedua ini dalam teori ekspektasi rasional diyakinkan bahwa perekonomian selalu beroperasi pada tingkat pengguna tenaga kerja penuh dan kebijakan diskrosioner pemerintah (kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal)

c. Ekonomi Segi Penawaran

Pandangan yang mengembangkan pemikiran mengenai segi penawaran datangnya bukan dari kalangan akademisi tetapi oleh penasehat-penasehat ekonomi dalam pemerintah Ronald Reagan yang terpilih sebagai presiden Amerika Serikat tahun 1980. Munculnya pemikiran ekonomi dari segi penawaran didorong oleh dua perkembangan yang berlaku dalam tahun 1970-an dan permulaan dalam tahun 1980-an. Faktor pertama berlakunya ditahun 1970-an diberbagai perekonomian dinegara industri. Faktor yang kedua yaitu terpilihnya Ronal Reagan yang terkenal konserfatif dan tidak menyukai campur tangan pemerintah yang berlebihan. Dengan tindakan seperti itu, segi penawaran bertujuan untuk meningkatkan penggunaan tenaga kerja dan mempertinggi efesiensi kegiatan perusahaan. Ditinjau dari tujuan-tujuan diatas dengan cara :

- 1) Mengurangi pengeluaran pemerintah
- 2) Mengurangi tingkat pajak yang di pungut terutama pajak dari golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi.
- 3) Penswastaaan perusahaan-perusahaan pemerintah yang tidak penting peranannya terhadap masyarakat.
- 4) Mendorong persaingan yang lebih sempurna dipasaran dan pasaran faktor.

d. Golongan Keynesian Baru

Golongan ahli ekonomi belum dapat menerima pandangan-pandangan yang mengkritik pemikiran keynes, dan tetap yakin dengan kesesuaian pandangan keynesian yang utama, pemikiran ekonomi yang masih tetap memberikan sokongan kepada

pandangan keynesian digolongkan kepada mazhab keynesian baru. Golongan ekspektasi dengan dapat sendirinya membuat penyesuaian sehingga perekonomian cenderung akan mencapai kesempatan kerja penuh. Mereka menunjukkan kemungkinan berlakunya kekakuan yang mempengaruhi efisiensi pasar barang. Hal ini menyebabkan perubahan harga tidak teralu fleksibel sehingga timbul masa berlakunya keadaan dimana terdapat kelebihan permintaan barang maupun penawaran barang.

8. Hubungan Anggaran Pembangunan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Adanya keterkaitan antara negara dalam dimensi fisik maupun ekonomi diharapkan akan menciptakan kerjasama yang mendorong adanya perdamaian dan membangun dunia. Dalam hal ini yang terjadi setelah adanya hubungan antara pembangunan dengan pertumbuhan. Seperti yang dideskripsikan dalam bukunya (kuncoro 2009) yaitu :

1. Keterkaitan antara sektor pertanian dan sektor industri

Pembangunan sektor kehutanan pertanian mengandung arti sebagai kesadaran untuk menempatkan arti penting sektor pertanian secara profesional dan kontekstual ; dalam arti menyegarkan kembali fasilitas, memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja pertanian dan membangun nasional dengan mengabaikan sektor lain. Revitalisasi dalam hal ini dimaksudkan adalah komitmen dan kerjasama seluruh stakeholder dan mengubah paradigma berpikir masyarakat melihat pertanian tidak hanya berurusan dengan bercocok tanam yang hanya sekedar

menghasilkan komoditas untuk konsumsi menurut teorinya (**Adli Deman -led Industrialization**). Adelman 1985 menekankan pentingnya adli dengan sejumlah analisis, ia membuktikan bahwa strategi adli lebih superior dibandingkan dengan strategi ekspor led growth. Khususnya apabila diterapkan negara berkembang dimana peranan sektor pertanian dari surplus ekstraksi menjadi surplus creation. Dan dibutuhkan keterkaitan permintaan antara sektor pertanian dengan sektor industri ataupun dengan sektor lain dalam pertanian. Ini sejalan dengan pemikiran (sumudiningrat 2000) yang mencoba menuangkan pola simbolis antara sektor pertanian dengan sektor industri indonesia lewat strategi dan pengembangan agro industri dan agribisnis.

2. Penurunan jumlah penduduk miskin

Sejalan dengan pergerakan kemiskinan pendapat riil meningkatkan pada sebagian besar masyarakat namun dengan tingkat yang tidak signifikan berpengaruh terhadap populasi kemiskinan. Dengan adanya pembangunan ekonomi di berbagai sektor ekonomi telah menanggulangi angka kemiskinan.

a. Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin dikawasan pedesaan dan perkotaan.

Perkembangan penduduk perkotaan lebih cepat dibanding penduduk pedesaan sehingga penurunan dalam jumlah absolute kemiskinan jauh lebih lambat dari total kaum miskin tahun 1987.

Terdapat alasan utama mengapa penurunan jumlah angka kemiskinan dan tingkat yang berkesinambungan cukup cepat

(kuncoro 2006). Ketidak seimbangan dalam kawasan pedesaan menurun antara tahun 1981 dan 1987.

b. Persentase penduduk miskin

Paling sedikit tingkat penduduk miskin telah diklasifikasikan pada tahun 1993 sebesar 20633. Klasifikasi penduduk miskin yaitu : pulau jawa 340% maluku 12 % kalimantan 9% sulawesi 11% berdasarkan klasifikasi dari jumlah penduduk miskin pada tahun 1993 sebesar 33, 4% atau berjumlah 19625 jiwa.

3. Investasi

Penanaman modal oleh para pengusaha terutama ditentukan oleh 2 faktor yaitu efisiensi marjinal modal dan suku bunga. Efisiensi marjinal modal menggambarkan tingkat pengembalian modal yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan yang diperoleh dari kegiatan investasi. Keynes mempunyai pendapat yang sangat berbeda dengan ahli-ahli ekonomi klasik mengenai faktor-faktor yang menentukan suku bunga. Pandangan keynes mengenai penentuan suku bunga telah diterangkan dalam bagian yang membahas kritik keynes terhadap pandangan ahli-ahli ekonomi

4. Kebijakan Percepatan Pembangunan

Analisis berikut menguraikan kebijakan-kebijakan mengenai percepatan pembangunan dari pertumbuhan ekonomi (sukirno 2011) yaitu :

a. Kebijakan diferifikasi semakin meningkat yang dapat mempercepat transformasi kegiatan ekonomi dari yang bersifat tradisional ke yang modern.

b. Mengembangkan ifrastruktur

Perkembangan infrastruktur haruslah selaras dengan pertumbuhan ekonomi karena tahap pembangunan yang rendah infrastrukturnya memiliki keterbatasan. Dengan demikian pengembangan infrastruktur haruslah terus menerus dilakukan dan harus selaras dengan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang.

c. Meningkatkan tabungan dan investasi

Pendapatan masyarakat yang rendah menyebabkan tabungan masyarakat rendah, sedangkan pembangunan memerlukan tabungan yang besar untuk membiayai investasi yang dilakukan.

B. Tinjauan Empiris

Tinjauan empiris merupakan hasil penelitian terdahulu yang mengemukakan beberapa konsep yang relevan dan terkait dengan sikap dan perilaku konsumen. Beberapa studi empiris maupun deskriptif yang menjadi acuan penulisan skripsi ini antara lain :

Penelitian yang di lakukan oleh Chairul Nizar (2011) yaitu Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Dimana pengaruh pertumbuhan ekonomi (PDB) terhadap tingkat kemiskinan secara langsung sangat kecil namun hubungannya negatif dan signifikan. Sedangkan, Investasi Asing Langsung (FDI), investasi pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dalam penelitian ini I Gusti Ayu Putri, Wahyuni Made Sukarsa, Nyoman Yuliarmi (2013) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. Alat analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah analisis jalur (path analysis) merupakan perluasan dari analisis regresi linier berganda untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel (model causal) yang diolah dengan menggunakan program SPSS. Kesimpulan pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, ini berarti bahwa Investasi tahun 2000-2012 yang mengalami peningkatan diikuti dengan laporan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali yang terus meningkat dan bahkan mampu menyaingi laju pertumbuhan ekonomi nasional dan Pengeluaran Pemerintah berhubungan positif dan signifikan terhadap kesenjangan pendapatan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali selama tahun 2000-2012. Hal ini berarti semakin besar pengeluaran pemerintah, maka semakin besar disparitas atau semakin timpang pendapatan masyarakat kabupaten/kota.

Pada penelitian yang di lakukan oleh Alfarendi Wicaksono (2017) Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 1996-2013. Dimana ada pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan analisis data sekunder yang mempunyai sifat runtut waktu (time series) atau disebut juga data tahunan, dimana $Y =$ Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung dari Tahun 1996 sampai 2013(%) dan $TK =$ Tenaga Kerja Provinsi Lampung dari Tahun 1996 sampai 2013 (jiwa) yang mendapat kesimpulan Berdasarkan hasil estimasi dapat diketahui bahwa secara parsial variabel Tenaga Kerja (TK) dan Pengeluaran Pemerintah (G) memberikan pengaruh

positif dan signifikan, sedangkan variabel Investasi (I) memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 1996-2013. Peningkatan 1% Tenaga Kerja akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung sebesar 0,26% dan peningkatan 1% Pengeluaran Pemerintah akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung sebesar 0,17%.

Afrizal Tahar & Maulida Zakhya (2011) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah, dengan menggunakan metode analisis data regresi linier berganda dengan perluasan analisis jalur. Dimana Nilai standardised coefficient beta untuk variabel DAU adalah 0.164 dengan nilai sig. 0.074 > α (0.05). Hal tersebut disebabkan DAU yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daera , sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran. Hal inilah mungkin yang menyebabkan DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sehingga mendapat kesimpulan pertama, PAD mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Kedua, DAU mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian daerah. Ketiga, PAD, DAU dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

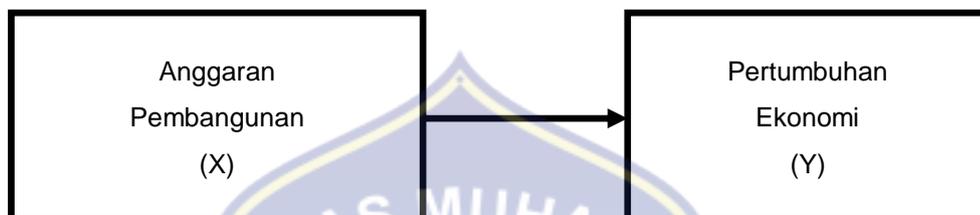
Robert J. Rasdalima, Antonius Y. Luntungan, Patrick C. Wauran (2017) dengan penelitian Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan analisis data sekunder berupa data kuantitatif, dimana penelitian tersebut mendapat dua (2) kesimpulan yang pertama, Pendapatan daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, Hasil ini tidak sesuai dengan harapan teoritik bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan yang kedua, Belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil ini sesuai dengan harapan teoritik bahwa belanja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

C. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan gambar umum penelitian yang akan di lakukan. Dari kerangka konseptual yang di tulis telah tergambar prosedur dan apa yang akan dikaji di dalam penelitian. Menurut Masri Singarimbun (dalam Mardalis, 1989:45-47), konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan fenomena yang sama.

Variabel independen (independent variable) adalah tipe variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel dependen (dependent variable) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Kedua tipe variabel ini merupakan kategori variabel penelitian yang paling sering digunakan dalam penelitian karena mempunyai kemampuan aplikasi yang luas.

Kerangka konsep yang menggambarkan pengaruh Variable Independent terhadap Variable Dependent, yaitu mengenai pengaruh anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebagai berikut.



Gambar 2.1 Skema Anggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan pernyataan suatu konsep yang perlu diuji kebenarannya. Maka sesuai dengan teori kerangka pemikiran, hipotesis atau dugaan sementara pada penelitian ini yaitu diduga bahwa anggaran pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur periode 2014-2018.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengenai pengaruh anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono,(2012:8) metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dalam bentuk angka ataupun dalam bentuk uraian. Dalam penelitian ini data sekunder yang diambil dari literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, waktu/periode petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang dilihat dari anggaran pembangunan daerah pada tahun 2014-2018, serta data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014-2018 yang di ambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kabupaten Luwu Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Luwu Timur, di instansi-instansi yang berkopetensi untuk dikembangkan berdasarkan anggaran pembangunan daerah khususnya di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kabupaten Luwu Timur. Adapun waktu penelitian ditentukan kurun waktu kurang lebih dua (2) bulan yaitu dari bulan Mei sampai Juni 2019.

C. Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah batasan-batasan terhadap lingkup variabel yang merupakan indikator penting sebagai penentu keberhasilan suatu penelitian dan merupakan batasan-batasan yang dipakai untuk menghindari interpretasi yang lain terhadap variabel yang diteliti. Adapun defenisi operasional penelitian ini yaitu :

a. Anggaran Pembangunan (X)

merupakan variabel bebas atau variabel independen (Variabel X) yang mempengaruhi variabel lain. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Halim (2012; 10) Dimana anggarannya pembangunan pada penelitian ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dalam periode tertentu di Kabupaten Luwu Timur yang diukur dalam miliar rupiah periode tahun 2014-2018.

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Y)

Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel terikat atau variabel dependen (Variabel Y) yang memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variasi bebas. Pertumbuhan Ekonomi wilayah adalah suatu proses yang dapat mewujudkan suatu perekonomian dan menggambarkan bagaimana aktivitas suatu perekonomian yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu, yang dimana memiliki beberapa indikator untuk melihatnya diantara lain; produk regional domestik bruto, ketidak seimbangan pendapatan, perubahan struktur perekonomian, pertumbuhan kesempatan kerja, tingkat dan penyebaran kemudahan. Adisasmita (2014; 91) yang akan menjadi tolak ukur dalam penelitian ini di Kabupaten Luwu Timur yang diukur dalam persen periode tahun 2014-2018.

2. Pengukuran Variabel

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Anggaran Pembangunan adalah yaitu Pengeluaran rutin daerah Kabupaten Luwu Timur (Juta Rupiah) dan Pengeluaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur (Juta Rupiah) kemudian dianalisis dengan satuan pengukuran persentase (%).
- b. Pertumbuhan Ekonomi adalah tingkat kemampuan instansi untuk menghasilkan laba. Dimana rasio ini dapat diukur dengan satuan persentase (%) dengan analisis *Return On Investment*.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Arikunto, (2013:106) “Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian”. Populasi merupakan sumber data yang sangat penting, karena tanpa kehadiran populasi penelitian tidak akan berarti serta tidak mungkin terlaksana. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk angka kuantitatif tahunan dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Sampel

Menurut Suharsimi Arikunto, (2013:108) “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti”. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*. Teknik ini dilakukan atas dasar pertimbangan penulis sendiri, artinya dalam pengambilan sampel penulis memilih langsung objek atau data yang dianggap dapat mewakili populasi dalam penelitian ini. Maka dalam hal ini sampel diambil dari BPS Kabupaten Luwu Timur selama lima (5) tahun terakhir yaitu 2012 sampai 2016.

E. Teknik pengumpulan data

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ini, digunakan metode penelitian yang mendukung data yang akan disusun untuk mengkaji beberapa referensi yang telah ada kemudian akan dipaparkan dan dijelaskan secara umum. Dimana dalam kutipan isi penulis membagi dua (2) macam metode kutipan sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu, data yang diperoleh langsung dilapangan berdasarkan objek penelitian. Maka, dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKKAD) Kabupaten Luwu Timur.
- b. Dokumentasi yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan penelitian ataupun berdasarkan data instansi serta literatur-literatur lainnya yang mendukung penelitian ini, tanpa mengurangi redaksi ataupun makna dalam kutipan literatur yang diambil.

F. Teknis Analisis

Adapun model data yang digunakan untuk menganalisis keterkaitan antara kedua variabel tersebut yaitu menggunakan analisis regresi persamaan linear sederhana yang dianalisis melalui persamaan :

$$Y = a + bX$$

Dimana :

Y = Variabl Terkait (Pertumbuhan Ekonomi)

X = Variable Bebas (Anggaran Pembangunan)

a = Intersep

b= Koefesien Regresi /slop'

Persamaan yang digunakan untuk mendapatkan nilai a dan b adalah sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum y)(\sum x^2) - (\sum x)(\sum xy)}{n\sum x^2 - (\sum x)^2}$$

$$b = \frac{\sum xy - n \bar{x} \bar{y}}{\sum x^2 - n (\bar{x})^2}$$

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

G. Rancangan Pengujian Hipotesis

Dalam hal ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS versi 21, dan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen (Anggaran Pembangunan) terhadap variabel dependen (Pertumbuhan Ekonomi). Sedangkan untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat menggunakan uji statistik di antaranya:

1. Analisis koefisien determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien Determinan (R^2) pada intinya mengukur kebenaran model analisis regresi. Dimana analisisnya adalah apabila nilai R^2 mendekati angka 1, maka variabel independen semakin mendekati hubungan dengan variabel dependen sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan model tersebut dapat dibenarkan. Model yang baik adalah model yang meminimumkan residual berarti variasi variabel independen dapat menerangkan variabel dependennya dengan α sebesar di atas 0,05

(Gujarati, 2008), sehingga diperoleh korelasi yang tinggi antara variabel dependen dan variabel independen.

Akan tetapi ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi terjadi bias terhadap satu variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen akan menyebabkan peningkatan R^2 , tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (memiliki nilai t yang signifikan).

2. Uji Statistik T

Uji hipotesis dengan T-test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut: $H_0 : \beta_1 = 0$ tidak berpengaruh, $H_1 : \beta_1 > 0$ berpengaruh positif, $H_1 : \beta_1 < 0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y .

H_0 diterima jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur adalah salah satu daerah tingkat II di propinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan wilayah eks Onder-afdeling Malili atau bekas Kewedanaan Malili. Perjuangan pembentukan Kabupaten Luwu Timur cukup panjang dimulai sejak tahun 1959 hingga akhirnya terbentuk pada tahun 2003.

Tahun 2003, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Kondisi geografis

Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Sulawesi Selatan, secara administratif berbatasan dengan beberapa kabupaten sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali,
Provinsi Sulawesi Tengah
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi
Tengah
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Kendari dan Kabupaten Kolaka
Provinsi Sulawesi Tenggara serta Teluk Bone

d. Sebelah Barat : Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan

Secara Geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di antara 2o03'00" Lintang Selatan sampai dengan 3o03'25" Lintang Selatan dan 119o28'56" Bujur Timur sampai dengan 121o47'27" Bujur Timur. Kabupaten Luwu Timur yang sebagian besar wilayahnya berada pada kawasan Pegunungan Verbeck merupakan daerah yang bertopografi pegunungan. Namun di beberapa tempat merupakan daerah.

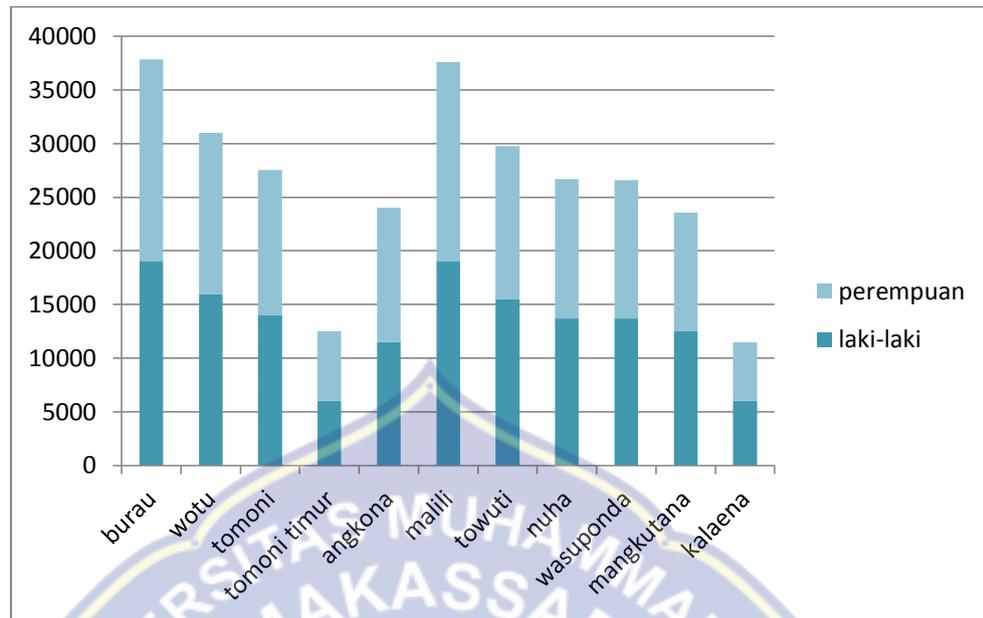
pedataran hingga rawa-rawa. Wilayah-wilayah yang bergunung adalah bagian utara dan barat sedangkan wilayah pedataran adalah bagian selatan dan barat. Kondisi datar sampai landai terdapat pada semua wilayah kecamatan dengan yang terluas di Kecamatan Angkona, Burau, Wotu, Malili dan Mangkutana. Sedangkan kondisi bergelombang dan bergunung yang terluas di Kecamatan Nuha, Mangkutana dan Towuti.

Kabupaten Luwu Timur terbagi menjadi 4 wilayah lereng dan 5 danau. Penggolongan tersebut adalah pegunungan (>40%), perbukitan (15 – 40%), bergelombang (8 – 15%) dan pedataran (0 – 8%). Luas wilayah yang memiliki kemiringan lebih dari 40 persen adalah 479.558,33 hektar atau mencapai 69,05 persen. Luas wilayah dengan kemiringan 15 sampai dengan 40 persen seluas 11.446,05 hektar atau 1,65 persen , luas wilayah dengan kemiringan 8 sampai dengan 15 persen mencapai 11.846,62 hektar atau 1,71 persen sedangkan luas wilayah dengan kemiringan 0 sampai dengan 8

persen mencapai 105.653 hektar atau 15,21 persen. Kabupaten Luwu Timur memiliki 5 danau, 1 diantaranya terletak di Kecamatan Nuha yaitu Danau Matano dengan luas 245,70 km² dan 4 lainnya terletak di Kecamatan Towuti yaitu Danau Mahalona (25 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau Lontoa (1.71 km²).

2. kondisi penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 mencapai 287.874 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 147.984 jiwa dan perempuan 139.890 jiwa. Kecamatan Burau memiliki penduduk paling banyak dibandingkan 10 kecamatan lainnya yaitu sebanyak 37.848 jiwa, disusul kecamatan Malili dengan jumlah penduduk 37.583 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Kalaena dengan penduduk 11.359 jiwa dan Tomoni Timur 12.579 jiwa. Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk laki-laki terbanyak adalah Kecamatan Malili yaitu 19.449 jiwa, sedangkan penduduk wanita terbanyak berada di Kecamatan Burau yaitu 18.653 jiwa.



Gambar 4.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2017

Selama kurun waktu 2010-2017, penduduk Kabupaten Luwu Timur terus bertambah yaitu dari 243.809 jiwa pada tahun 2010 menjadi 281.822 jiwa pada tahun 2016 dan pada tahun 2017 menjadi 287.874 jiwa. Dengan demikian, selama tahun 2010 hingga 2017 rata-rata laju pertumbuhan penduduk (LPP) Kabupaten Luwu Timur adalah sekitar 1,81 persen per tahun. Kecamatan yang memiliki LPP tertinggi adalah Kecamatan Wasuponda yaitu mencapai 4,27 persen per tahun di susul Kecamatan Nuha dengan LPP sebesar 2,96 persen serta Kecamatan Tomoni dengan LPP sebesar 2,28 persen per tahun.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Luwu Timur Menurut Kecamatan Tahun 2017

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Burau	37.848
Wotu	31.308
Tomoni	27.523
Tomoni Timur	12.579
Angkona	24.282
Malili	37.583
Towuti	29.767
Nuha	26.159
Wasuponda	25.802
Mangkutana	23.567
Kalaena	11.456
LUWU TIMUR	287.874

Sumber : Luwu Timur Dalam Angka

Produksi beras memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar penduduk Kabupaten Luwu Timur. Komoditi ini sangat penting karena merupakan komoditas pokok. Dengan naik turunnya harga beras akan sangat berpengaruh terhadap perilaku masyarakat secara umum.

tabel 4.2
Produktivitas Tanaman Pangan Kabupaten Luwu Timur Tahun
2015-2017

jenis tanaman	produktivitas		
	2015	2016	2017
Padi	71,73	71,61	72,10
Jagung	59,25	60,48	55,60
Kacang Kedelai	9,63	10,00	8,70
Kacang Tanah	11,68	11,79	13,50
Kacang Hijau	9,47	10,67	12,00
Ubi Kayu	145,23	139,40	145,90
Ubi Jalar	92,00	88,40	87,70

Pada Tahun 2017 meskipun luas panen mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu 42.910 Hektar menjadi 42.789 Hektar, namun produksi padi pada tahun 2017 mencapai 308.404,19 Ton, angka ini sedikit meningkat 0,37 persen dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 307.265,92 Ton. Dari angka produksi tersebut 47 Ton merupakan Padi ladang dengan luas panen sebesar 10 Hektar yang terletak di Kecamatan Wasuponda. Sedangkan Kecamatan yang paling

banyak menghasilkan produksi padi adalah Kecamatan Wotu dengan produksi padi mencapai 65.073,5 ton.

Jenis tanaman palawija yang ada di Kabupaten Luwu Timur meliputi Jagung, Kacang Kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi

jalar. Dari berbagai jenis tanaman palawija tersebut tanaman jagung memiliki nilai produksi terbanyak yaitu mencapai 31.471,31 ton dengan luas panen mencapai 5.663 hektar. Jenis palawija terbanyak kedua yang dihasilkan oleh Kabupaten Luwu Timur adalah ubi jalar dengan produksi 315,56 ton dan luas panen 36 Hektar, tanaman selanjutnya adalah ubi kayu dengan produksi mencapai 889,93 ton dan luas panen 61 hektar.

Tanaman pertanian lainnya yang termasuk sebagai tanaman bahan makanan adalah tanaman hortikultura. Komoditas hortikultura merupakan sumber pangan protein nabati, vitamin, bahan baku obat dan estetika. Sayur mayur merupakan salah satu komoditas hortikultura yang penting bagi pemenuhan kesehatan penduduk, karena kandungan gizi yang vital untuk kebutuhan hidup ada pada sayuran.

Pada Tahun 2017, jenis tanaman sayuran yang diproduksi di Kabupaten Luwu Timur meliputi sawi, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, terong, kangkung dan bayam. Dari berbagai jenis tanaman sayuran tersebut, tanaman kangkung memiliki produksi paling banyak mencapai 144,35 ton, selanjutnya produksi sayuran terbanyak adalah tanaman tomat dengan jumlah produksi mencapai 79,95 ton, sedangkan cabe besar hanya mencapai 4,12 ton.

Buah-buahan yang banyak diproduksi di Kabupaten Luwu Timur antara lain buah mangga dengan produksi mencapai 218,6 ton, buah durian 42,3 ton, buah jeruk 13,7 ton, buah pisang 3.060,50 ton, pepaya 474,8 ton, Nanas 51,2 ton, Rambutan 1,1 Ton dan Duku 2,0 Ton.

Tanaman obat yang banyak diproduksi di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 adalah Laos/Lengkuas dengan jumlah produksi mencapai

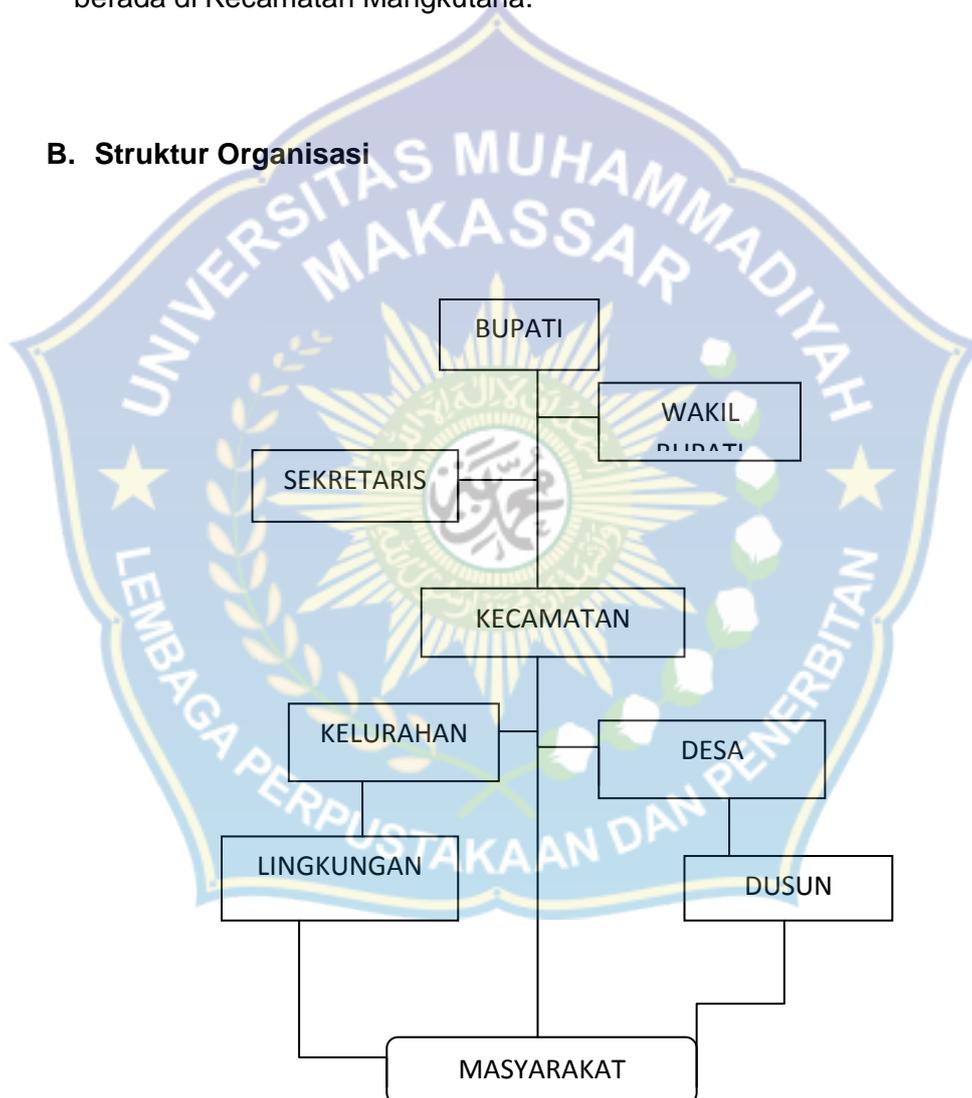
3.274 ton. Jenis tanaman produksi terbanyak berada di Kecamatan Tomoni, selanjutnya tanaman kunyit sebanyak 1.892 ton dan produksi terbanyak berada di Kecamatan Tomoni Timur, sedangkan tanaman jahe di dengan jumlah produksi 1.582 ton menempati urutan ke tiga jenis tanaman yang memiliki produksi terbanyak di Kabupaten Luwu Timur, terutama di Kecamatan Tomoni Timur.

Di subsektor perkebunan, Luas tanaman terluas di Kabupaten Luwu Timur adalah tanaman Kakao dengan luas mencapai 22,789,72 hektar dengan jumlah produksi 12.864,72 ton. Kelapa sawit merupakan komoditas kedua yang memiliki luas tanam terluas yaitu 10.783,99 hektar, meskipun luas tanamnya lebih sedikit dibandingkan luas tanam kakao namun jumlah produksinya lebih banyak yaitu mencapai 104.490,96 ton. Tanaman ketiga yang memiliki luas tanaman terbesar adalah lada yang luasnya mencapai 5.871,30 hektar dengan jumlah produksi mencapai 4.303,92 ton. Selanjutnya 3 tanaman perkebunan lainnya yang ada di Kabupaten Luwu Timur adalah kelapa, cengkeh, dan kopi dengan luas tanaman masing-masing 1.881,65 hektar, 945,40 hektar dan 54,85 hektar dengan jumlah produksi berturut-turut 2.471,57 ton, 16,99 ton dan 13,32 ton.

Pada sub sektor ternak jenis ternak yang banyak terdapat di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2017 adalah sapi potong, kerbau, kambing dan babi. Babi merupakan jenis ternak yang paling banyak populasinya di Kabupaten Luwu Timur yaitu sebanyak 18.097 ekor, sedangkan ternak paling banyak kedua adalah sapi potong dengan jumlah mencapai 15.546 ekor, dan sisanya kambing dengan jumlah populasi 14.060 ekor, kerbau 1.067 ekor.

Populasi unggas yang ada di Kabupaten Luwu Timur tahun 2017 meliputi ayam pedaging 949.791 ekor dan banyak di produksi di Kecamatan Malili , ayam kampung 434.617 ekor banyak di produksi di Kecamatan Tomoni, ayam petelur 124.522 ekor banyak di produksi di Kecamatan Kalaena dan itik 25.710 ekor dengan produksi terbanyak berada di Kecamatan Mangkutana.

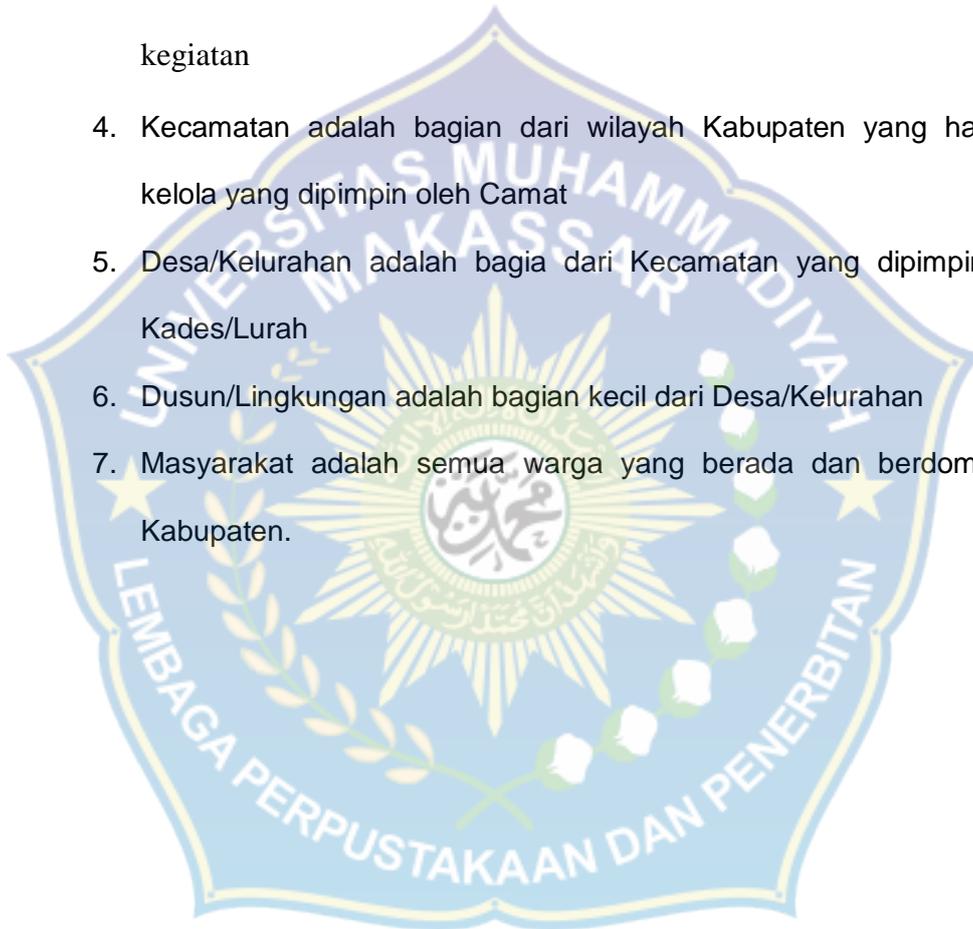
B. Struktur Organisasi



gambar 4.2 struktur organisasi kabupaten luwu timur

C. Uraian Tugas dan Fungsi Masing-masing Komponen

1. Bupati adalah pemimpin kabupaten
2. Wakil Bupati mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam mengelola wilayah
3. Sekretaris mempunyai tugas membantu dalam mengoordinasikan kegiatan
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Kabupaten yang harus di kelola yang dipimpin oleh Camat
5. Desa/Kelurahan adalah bagian dari Kecamatan yang dipimpin oleh Kades/Lurah
6. Dusun/Lingkungan adalah bagian kecil dari Desa/Kelurahan
7. Masyarakat adalah semua warga yang berada dan berdomisili di Kabupaten.



V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Perekonomian Kabupaten Luwu Timur

Pada tahun 2018, realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur tercatat sebesar 800.855.947 ribu rupiah, yang terdiri atas pendapatan asli daerah sebesar 50.941.901 ribu rupiah, dana perimbangan sebesar 690.086.958 ribu rupiah, dan pendapatan lain yang sah sebesar 59.827.088 ribu rupiah.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi penerimaan mengalami kenaikan sebesar 2,13 persen. Sumber terbesar penerimaan adalah dana alokasi umum, yaitu sebesar 518.259.515 ribu rupiah atau sebesar 64,71 persen dari seluruh penerimaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2018 meningkat 9,58 persen jika dibandingkan tahun 2017. Gambaran perekonomian Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat pada tabel 5.1, 5.2, dan 5.3 berikut :

Tabel 5.1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Luwu Timur 2014-2018

No.	Tahun	PAD
1	2014	19.255.492
2	2015	21.901.552
3	2016	53.921.492
4	2017	46.490.002
5	2018	50.941.901

Dari tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa PAD tertinggi berada pada tahun 2016, sementara PAD terendah terletak pada tahun 2018

**Tabel 5.2 Dana Perimbangan Kabupaten Luwu Timur
Periode 2014-2018**

No.	Tahun	Dana Perimbangan
1	2014	421.662.901
2	2015	513.649.266
3	2016	942.475.051
4	2017	616.672.781
5	2018	690.086.958

Dari tabel 5.2 dapat dijelaskan bahwa Dana Perimbangan tertinggi berada pada tahun 2016, sementara yang terendah terletak pada tahun 2014

**Tabel 5.3
Pendapatan Sah Lainnya pada Kabupaten Luwu Timur Periode
2014-2018**

No.	Tahun	Pendapatan Sah Lainnya
1	2014	58.921.616
2	2015	61.056.640
3	2016	76.360806
4	2017	120.625.556
5	2018	59.827.088

Dari tabel 5.3 dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Sah Lainnya tertinggi berada pada tahun 2017, sementara yang terendah terletak pada tahun 2014

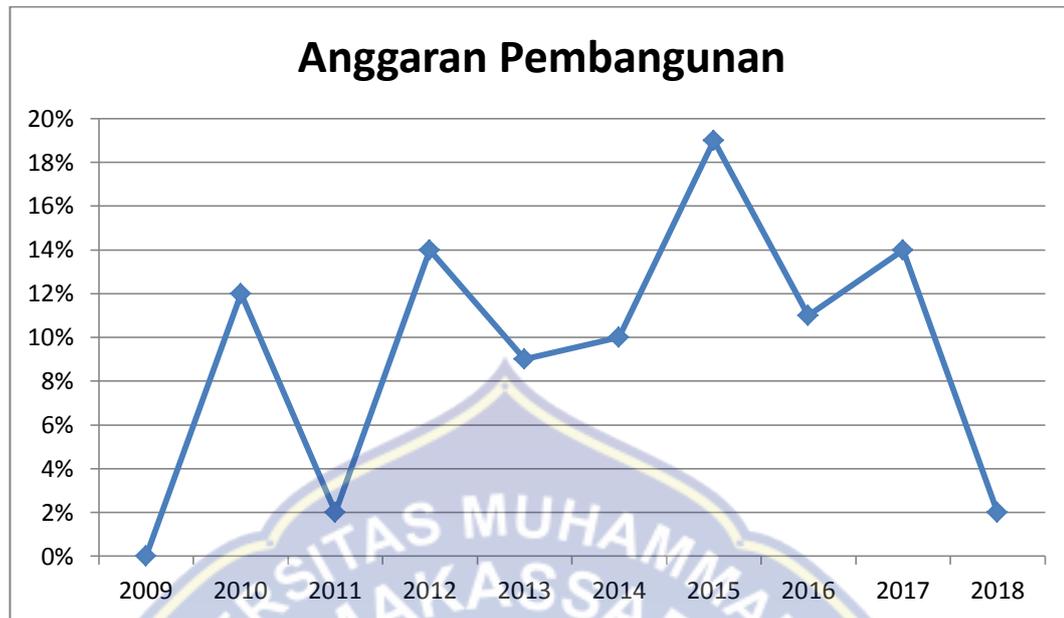
B. Realisasi Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur

Untuk melihat seberapa besar Anggaran Pembangunan dari tahun ke tahun dapat dilihat dari Anggaran Pembangunan Periode 2009-2018 pada tabel 5.4 berikut

Tabel 5.4
Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur
2009-2018

No.	Tahun	Anggaran Pembangunan	Selisih	Persentase
1	2009	280.471562	-	0%
2	2010	322.300.628	41.829.066	12,97%
3	2011	331.206.123	8.905.945	2,68%
4	2012	387.926.677	56.720.554	14,62%
5	2013	427.817.752	39.891.075	9,32%
6	2014	478.360.086	50.542.316	10,56%
7	2015	596.607.459	118.247.373	19,81%
8	2016	672.757.349	76.149.890	11,31%
9	2017	783.788.339	111.030.690	14,16%
10	2018	800.855.947	17.067.608	2,13%

Dari tabel di atas menjelaskan peningkatan jumlah Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur selalu mengalami kenaikan dari 2009-2018



Gambar 5.1 Grafik Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur Periode 2009-2018

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kenaikan Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu 19,81% atau sebesar 118.247.373, sementara tingkat kenaikan Anggaran Pembangunan Kabupaten Luwu Timur terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 17.067.608 atau 2,13%

C. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur

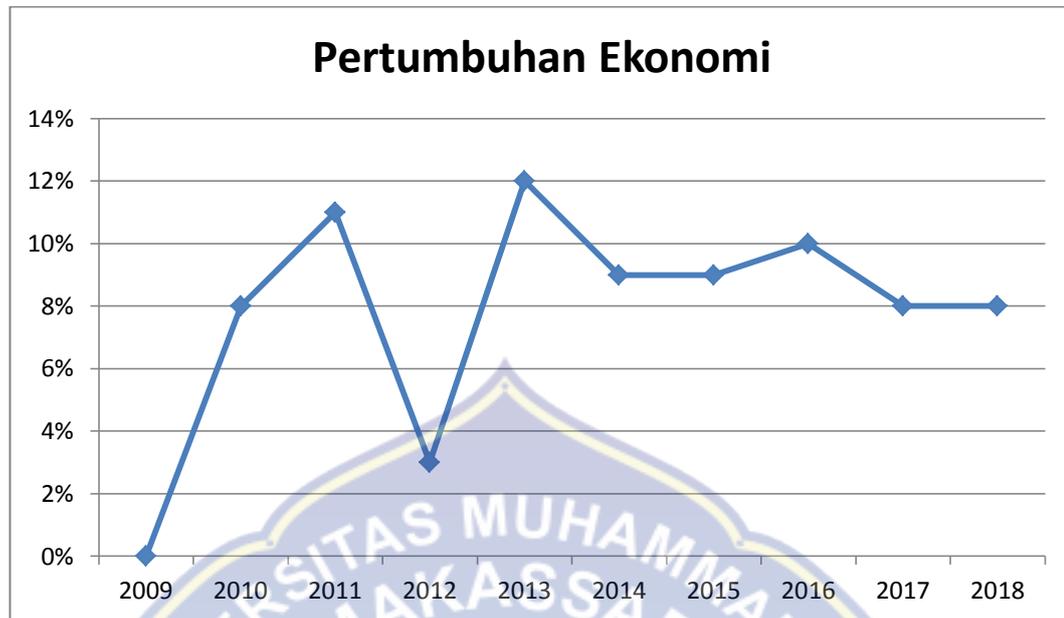
Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun disajikan perubahan PDRB atas dasar konstan secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan. Pertumbuhan Ekonomi dapat dilihat pada tabel 5.5

Tabel 5.5

**Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur
2009-2018**

No.	Tahun	PDRB (juta upiah)	Selisih	Pertumbuhan Ekonomi
1	2009	1.601.857	-	0%
2	2010	1.747.879	146.022	8,35%
3	2011	1.981.994	234.115	11,81%
4	2012	2.057.030	75.036	3,64%
5	2013	2.337.550	280.520	12%
6	2014	2.587.345	249.795	9,65%
7	2015	2.847.109	259.764	9,12%
8	2016	3.182.499	335.390	10,53%
9	2017	3.485.075	302.576	8,67%
10	2018	3.801.801	316.726	8,33%

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur selalu mengalami peningkatan dari 2007-2016



Gambar 5.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur Periode 2009-2018

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 12%, sementara persentase pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun 2012 yaitu 3,64% atau hanya 75.036

D. Pengaruh Anggaran Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh anggaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, dapat dilihat dari hasil olahan data sebagai berikut :

Uji Hipotesis

1. Analisis koefisien determinasi

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Koefisien Determinan (R^2) pada intinya mengukur kebenaran model analisis regresi. Berdasarkan tabel 5.6

Tabel 5.6
Analisis Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	.912	.982	.980	.106692	.982	439.199	1	8	.000	2.242

a. Predictors: (Constant), ANGGARAN PEMBANGUNAN

b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI

Sumber hasil olahan data 2018

Berdasarkan tabel 5.6 di atas dapat dilihat bahwa kemampuan variabel X terhadap Y berpengaruh sebesar 0,980.

2. Uji Statistik T

Uji hipotesis dengan T-test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh secara

signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Untuk mengkaji pengaruh variabel independen terhadap dependen secara individu dapat dilihat hipotesis berikut: $H_0 : \beta_1 = 0$ tidak berpengaruh, $H_1 : \beta_1 > 0$ berpengaruh positif, $H_1 : \beta_1 < 0$ berpengaruh negatif. Dimana β_1 adalah koefisien variabel independen ke-1 yaitu nilai parameter hipotesis. Biasanya nilai β dianggap nol, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y .

H_0 diterima jika $T_{hitung} < T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

H_0 ditolak jika $T_{hitung} > T_{tabel}$ pada $\alpha = 5\%$

Berdasarkan tabel 5.7

Tabel 5.7
Uji Statistic T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.599	.099	6.023	.000
	ANGGARAN PEMBANGUNAN (X)	.004	.000	.991	20.957

Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI (Y)

Sumber hasil olahan data 2018

Berdasarkan tabel 5.7 di atas pengaruh dari masing-masing variabel Anggaran Pembangunan (X) terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) dapat dilihat dari tingkat signifikan (Probabilitas). Dengan melihat tabel 5.5 di atas variabel Anggaran Pembangunan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0.00 dengan nilai t_{hitung} sebesar 20,957. Hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel anggaran lebih kecil dari 0,05.

adanya peningkatan anggaran yang dikeluarkan pemerintah ke daerah mengakibatkan pertumbuhan ekonomi juga semakin meningkat.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 5.7 variabel Anggaran Pembangunan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,00. Hal ini berarti menolak H_0 dan menerima H_1 sehingga dapat dikatakan bahwa anggaran pembangunan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel anggaran lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian, adanya peningkatan anggaran yang dikeluarkan pemerintah ke daerah maka pertumbuhan ekonomi akan semakin meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Onggi Pasorong (2015) bahwa pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

meningkatnya pembangunan di suatu Negara atau Daerah ditandai dengan beberapa aktivitas perekonomian seperti meningkatnya

produktivitas dan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk sehingga terjadi perbaikan tingkat kesejahteraan.

seperti yang kita ketahui bersama Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah. Penyusunan anggaran tersebut ditata dalam suatu sistem anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pelayanan publik. Meskipun menjadi wewenang pemerintah daerah, tetapi penyusunan APBD harus tetap mengacu pada APBN sehingga diharapkan terjadi kesesuaian prinsip anggaran. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah diutamakan digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu untuk meningkatkan laju pembangunan dan berjalannya roda pemerintahan, daerah berupaya menggali sumber-sumber pendapatan yang baru dan potensial serta memberdayakan sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin di dalam membiayai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut. Dalam hubungan ini pengelola APBD di daerah terus disempurnakan agar dapat menghimpun dana yang cukup untuk membiayai pembangunan dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

selain kemandirian pemerintah mengelola sumber daya daerah pemerintah kabupaten Luwu Timur juga membangun sarana dan prasarana masyarakat yang diwujudkan dalam peran jaringan transportasi, komunikasi dan informatika yang memungkinkan orang, barang dan jasa bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan pertukaran informasi secara cepat yang menjadi motor penggerak pertumbuhan Ekonomi dan mendukung daya saing daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Adisasmita, R. 2014. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Afrizal, T dan Maulida, Z. 2011. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah
- Alfarendi, W. 2017. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Lampung Tahun 1996-2013*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung
- Ayunia, P. 2013. *Pengaruh Ekspor, Impor dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode 2002-2012*.
- Chairu, N. 2011. *Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Serta Hubungannya Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Tesis. Universitas Syiah Kuala Banda Aceh.
- I Gusti, A. P., Wahyuni, M. S. dan Nyoman, Y. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali*. Tesis. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia..
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah, Reoformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro, M. 2009. *Merode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Nafarin. 2012. *Penganggaran Perusahaan*, Salemba Empat. Jakarta.

Rasdalim, R.J, Luntungan, A.Y. & Wauran, P.C. 2017. *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara*. Tesis. Universitas Sam Ratulangi Manado.

Robert J. R., Antonius Y. L. dan Patrick C. W. 2017. *Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara*.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sumudiningrat. 2000. *Visi dan Misi Pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, (Yogyakarta ; IDEA 2000)

Sukirno, S, 2011. *Makro Ekonomi, teori dan pengantar*, edisi ketiga, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia No.34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi. Jakarta: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan.

